

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur masalah otonomi daerah dan UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan revisi terhadap UU No.22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua undang-undang tersebut mengatur pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisien penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Sejalan dengan perubahan UU otonomi daerah tersebut, tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pembiayaan.

Misi utama ditetapkannya kedua Undang – Undang tersebut adalah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan

efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu di perlukannya upaya agar kinerja keuangan pemerintah handal dan dapat di percaya. Agar kinerja keuangan pemerintah menggambarkan sumber daya keuangan daerah, tersebut, maka diperlukan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan sumber pembiayaan karena sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk

menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi (Bastian, 2006:274). Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu instrument untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian fiskal (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta *debt coverage ratio* (Abdul Halim, 2008:232).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010), hasil menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007

menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah sangat kurang. Desentralisasi Fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Oldison Santosa, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2014), hasil menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan asset kabupaten kepulauan Sangihe pada rasio efektivitas PAD jika dilihat dari kinerja keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak berjalan secara efektif, untuk rasio kemandirian dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pusat sangat tinggi. Rasio pajak daerah terhadap PAD menurun dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena masih kurangnya wajib pajak dalam membayar pajak, untuk analisis pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan walaupun tidak signifikan.

Penelitian lain dilakukan oleh Oesi Agustina. A (2013), hasil menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010). Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya. Obyek pada penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk mengetahui kinerja keuangan pada periode tahun 2011-2013. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2011-2013”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2011-2013?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2011-2013 yang meliputi :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
- c. Rasio Desentralisasi Fiskal
- d. Rasio Efektifitas
- e. Rasio Efisiensi
- f. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi akademik, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dibidang sektor publik tentang indikator kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian dimasa yang akan datang di bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan pembahasan serta penutup.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan teori-teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang relevan untuk membahas rumusan masalah serta *review* penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional, serta alat analisis untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menjelaskan

keadaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran peneliti yang diharapkan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan pihak lain yang terkait.